



**DINAS SOSIAL DAERAH  
MOROWALI UTARA**

# LAPORAN

**AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN**

**TAHUN  
2022**

ALAMAT : JALAN POROS GANDA-GANDA KECAMATAN PETASIA KAB MOROWALI UTARA  
EMAIL : DINSOSMOROWALIUTARA@GMAIL.COM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Daerah Untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu Bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami,tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale,      Februari 2023  
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

**ROMEL ERWIN TUNGKA,S.Pt.**  
NIP.19730723 200012 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 .Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan .

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan penyusunan LAKIP ini.

Semoga LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Kolonodale, Februari 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



**Drs. YOSPID LABANGARA**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.19630918 199303 1 009

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi. Kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Dinas Sosial dituntut untuk mampu senantiasa memperbaiki diri dalam upaya mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta melaksanakan ketatausahaan Dinas dibidang sosial.

Capaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran perjanjian kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan atau kegagalan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kendala kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Kepada Bupati Morowali Utara.

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran capaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dengan 6 indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja, indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun belum memenuhi target, untuk hasil capaian kinerja pada tahun 2022 ini, selain karena faktor program dan kegiatan prioritas juga didukung adanya komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dengan memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung terealisasinya target kinerja indikator kinerja utama, tanpa mengabaikan program/kegiatan lainnya.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
1.3 ISU STRATEGIS .....	2
1.4 DATA UMUM .....	5
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	7
2.2 VISI MISI .....	7
2.3 KESELARASAN KINERJA .....	8
2.4 TUJUAN DAN SASARAN.....	8
2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	9
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	9
2.7 CASECADING KINERJA .....	10
2.8 PERJANJIAN KINERJA .....	11
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	13
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA .....	13
3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA .....	16
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS .....	18
3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN .....	19
3.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	20
3.1.6 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA .....	21
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	21
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
4.1 KESIMPULAN .....	24
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA .....	24

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Dinas Sosial Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah termasuk Dinas Sosial sebagai unsur penyelenggara pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Kedudukan Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara. Adapun tugas Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara adalah : **“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.”**

### **1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Sosial Daerah**

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Morowali Utara, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain diluar faktor internal.

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Kab. Morowali Utara masih cukup tinggi, ini adalah salah satu dampak gejolak krisis ekonomi global.

Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

1. Keterbatasan Dana APBD dalam merealisasikan rencana kerja dari Dinas Sosial Daerah sehingga pelaksanaan Pengumpulan Data Masyarakat Miskin, Anak Terlantar, Disabilitas, Komunitas Adat Terpencil dan Masalah Sosial Lainnya belum maksimal dilaksanakan.
2. Belum tersedia Fasilitas Trauma Center guna menangani pasien khusus yang mengalami trauma atau kecelakaan akibat berbagai masalah sosial.
3. Masih kurangnya Pekerja Sosial yang mampu untuk menangani masalah sosial yang terjadi di Kab. Morowali Utara.
4. Tingginya ekspektasi terhadap layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Morowali Utara dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Morowali Utara, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**(PMKS) Di Kabupaten Morowali Utara**

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2021)	Jumlah (2022)
1	Anak Balita Terlantar	orang	-	-
2	Anak Terlantar	orang	-	-
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	6	17
4	Anak Jalanan	orang	-	-
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	5	5
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	2	1
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	200	252
8	Penyandang Disabilitas	orang	159	150
9	Tuna Susila	orang	-	-
10	Gelandangan	orang	-	-
11	Pengemis	orang	-	-
12	Pemulung	orang	-	-

13	Kelompok Minoritas	orang	-	-
14	Bekas warga binaan Pemasyarakatan	orang	-	-
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	-	-
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	1	-
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang	-	-
18	Korban bencana alam	orang	70	59
19	Korban bencana sosial	orang	-	-
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang	-	-
21	Keluarga Miskin	Jiwa	65.549	65.549
22	Keluarga bermasalah sosial psikologis	KK	-	-
23	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	-	-
24	Komoditas Adat Terpencil	orang	991	991
25	Korban Trafficking	orang	-	-
26	Korban tindak kekerasan	orang	-	-

#### 1.4 Data Umum Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara

##### *Susunan Organisasi*

Susunan organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaannya mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

*Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Pegawai Honorer Dinas Sosial:*

Golongan IV : 4 Orang

Golongan III : 15 Orang

Golongan II : 6 Orang

Golongan I : 0 Orang

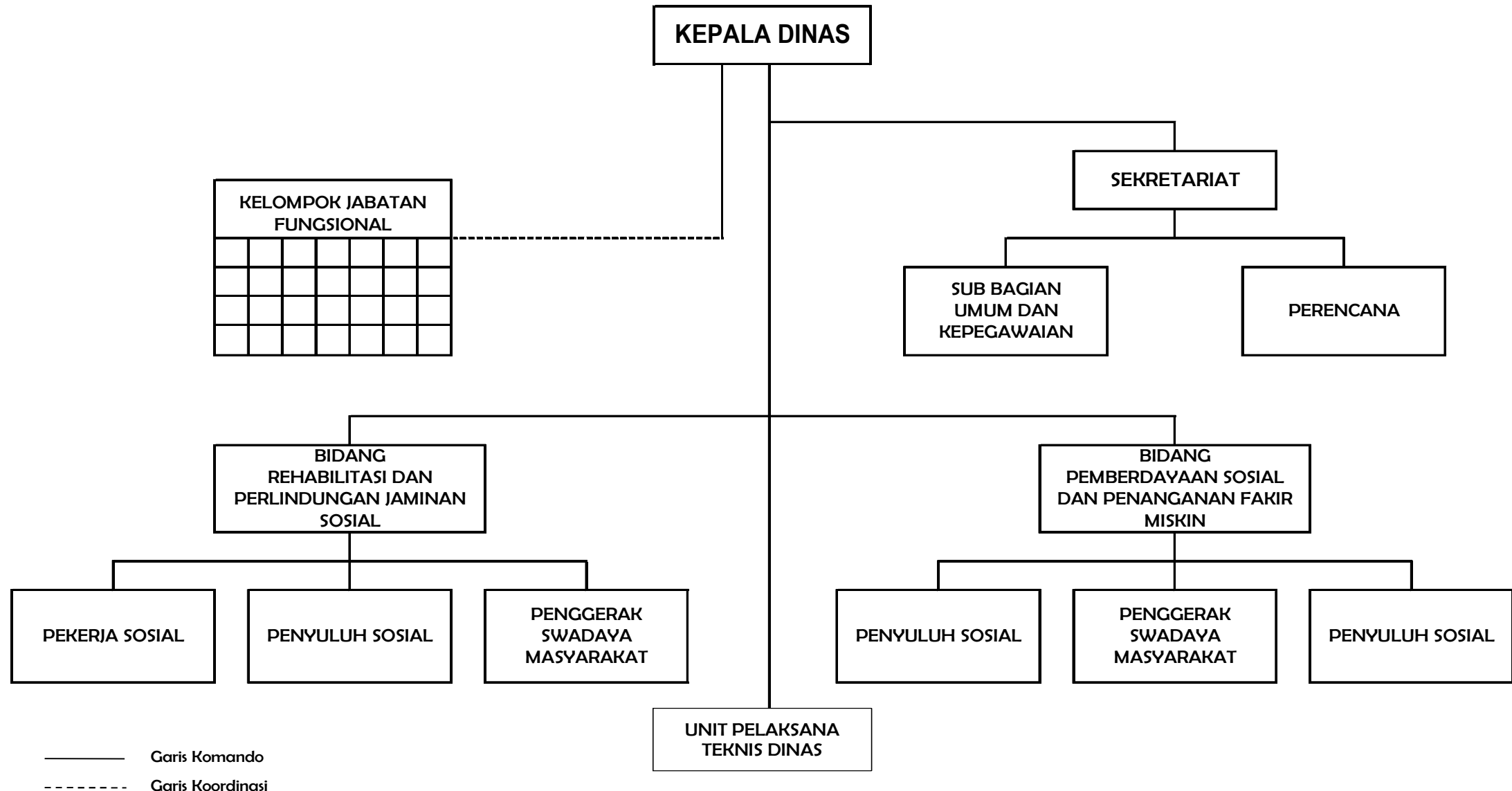
Honorer : 17 Orang

---

Jumlah : 42 Orang

Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAERAH**





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Dinas Sosial**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penangana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan .
3. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan.

#### **2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi "***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dinas Sosial dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu "***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera***", dengan misi' Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah".

### 2.3 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasana kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan Kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan Kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI-3

Misi 3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Di Topang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah		
	Tujuan	Meningkatnya Kemandirian Desa	
		Sasaran 1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS
		Sasaran 2	Menurunkan Beban PMKS

### 2.4 Sasaran dan Tujuan Dinas Sosial Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Dinas Sosial Daerah mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
3. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan.

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS
			Menurunkan Beban PMKS

### 2.5 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

#### 3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial

#### 4. Program Penanganan Bencana

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

### 2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah

Penetapan Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Daerah .

Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

Tabel. 3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022**

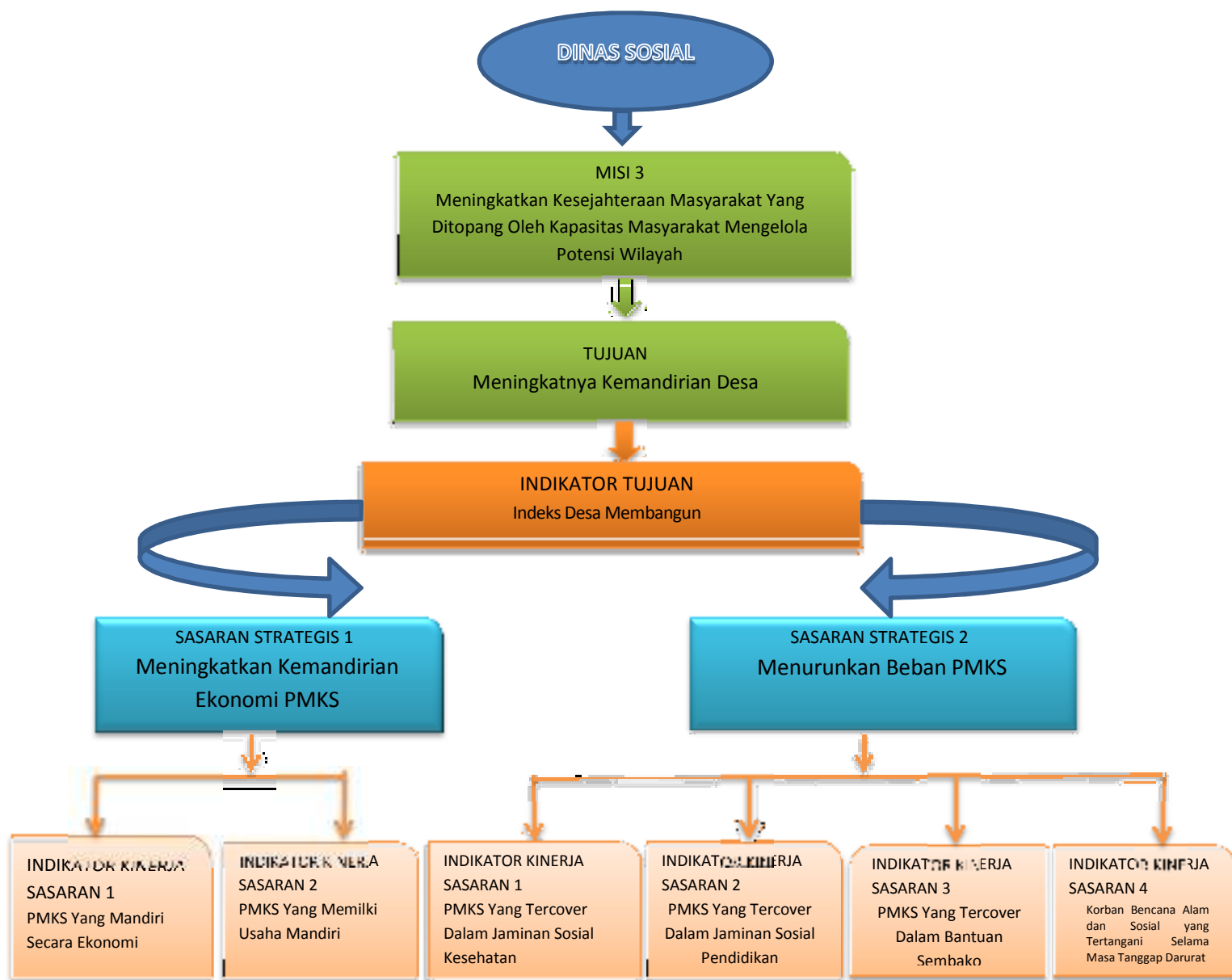
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Keterangan/Formulasi IKU	Sumber Data
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri secara Ekonomi}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat}}{\text{Jumlah Total korban Bencana Alam}} \times 100\%$	Dinas Sosial

### 2.7 Cascading kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten, maka Kabupaten Morowali Utara Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/ hubungan sebab akibat dan alignment/ keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks keselarasan Kinerja Dinas Sosial yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

## Casecading Kinerja Misi 3



### 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Sosial Daerah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise

atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator yang harus dicapai, maka pada Tahun 2022 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Daerah**  
**Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Terverifikasi Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	100%
		Persentase PMKS yang Terverifikasi Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%
		Persentase PMKS yang Terverifikasi Dalam Bantuan Sembako	100%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan misi pemerintah.

**3.1.1 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel. 5**  
**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	RUMUS IKU
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%	25,24%	100,96%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri secara Ekonomi}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%	0,8%	3,2%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$
<b>Nilai rata-rata capaian kinerja</b>					<b>52,08%</b>	
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	100%	79%	79%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$

		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	100%	7,4%	7,4%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat}}{\text{Jumlah Total korban Bencana Alam}} \times 100\%$
<b>Nilai rata-rata capaian kinerja</b>					<b>71,6%</b>	

Dari tabel diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Sosial Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

**Tabel. 6**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Selanjutnya pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 yang dalam hal ini yaitu masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS, dengan 2 indikator dapat diuraikan sebagai berikut :**
  - a. Persentase PMKS yang mandiri secara ekonomi

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) ,program ini dibantu 21 orang Pendamping . Tahun 2022 bantuan dari PKH tersebut diberikan kepada 1.125 orang yang tersebar di 10 Kecamatan komponen kesejahteraan secara ekonomi .Selain bantuan dari PKH ,Dinas Sosial memberikan bantuan bagi kelompok karang taruna berupa bantuan baju olahraga dan kelengkapan peralatan olahraga. Karang Taruna yang mendapatkan bantuan pada tahun 2022 yaitu berjumlah 25 KT tersebar di 7 Kecamatan .

b. Persentase PMKS yang memiliki Usaha Mandiri

Program Keluarga Harapan turut mendukung keberhasilan indikator ini, dimana dari 1.125 orang yang mendapatkan bantuan Kesejahteraan ,pada tahun 2022 ada 9 orang yang sudah tidak termasuk keluarga penerima manfaat dari program tersebut.Dimana sesuai dengan kriteria penilaian untuk mendapatkan bantuan sudah tidak layak dan dianggap sudah mandiri secara ekonomi .

Dari 2 indikator kinerja sasaran tersebut diatas nilai rata-rata capaian sasaran strategis Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS sebesar 52,08%, dengan predikat rendah.

**2. Sasaran Menurunkan Beban PMKS, dengan 4 indikator masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :**

a. Persentase PMKS yang tercover dalam jaminan sosial kesehatan.

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pelayanan terhadap PMKS dengan pemenuhan pelayanan BPJS yaitu sebanyak 51.862 ditambah PKH 571 Jiwa bantuan Komponen kesehatan dari keseluruhan jumlah PMKS berjumlah 65.549 Jiwa yang tersebar diKabupaten Morowali Utara. Capaian output dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai 79 Persen dari target 100%.

b. Persentase PMKS yang Tervercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yaitu berjumlah 5.820 dan 3.484 orang yang mendapatkan bantuan Jaminan Sosial Pendidikan dari PKH dan tersebar di 10 Kecamatan diKabupaten Morowali Utara.Capaian Output dari target tersebut mencapai target yaitu 100 %.

c. Persentase PMKS yang Tervercover Dalam Bantuan Sembako

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang terdata dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yaitu sebanyak 4.489 orang dan bantuan sembako yang diperuntukan bagi penyandang

Disabilitas sebanyak 150 orang, begitu juga bantuan bagi Lansia sebanyak 252 orang. Capaian target dari indikator ini mencapai 7,4% dari target 100%.

d. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat. Pada Tahun 2022 jumlah bencana Alam dan sosial yang tertangani di Kabupaten Morowali Utara mencapai target 100% yaitu bencana kebakaran dan putting beliung yang terdampak sebanyak 59 orang. Dimana bencana kebakaran di Kecamatan Petasia berjumlah 27 orang, bencana kebakaran di Kecamatan Petasia Timur 20 orang, bencana kebakaran di Kecamatan Petasia Barat 8 orang dan bencana putting beliung di Kecamatan Petasia Desa Ganda-Ganda yang terdampak yaitu 4 orang. Dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai target 100%. Kegiatan selama masa tanggap darurat Dinas Sosial dibantu 23 orang Tagana (Taruna Siaga Bencana).

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Gambaran perbandingan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2021 menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel. 7**

**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	0	25,24%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	0	0,8%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	0	79%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	0	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	0	7,4%

		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	0	100%
--	--	---	---	------

**1. Sasaran Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS, dengan 2 indikator masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut :**

a. Persentase PMKS yang mandiri secara ekonomi

Dikarenakan adanya perbaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial sehingga perbedaan data pada indikator tahun 2021 dengan tahun 2022 sangat berbeda, maka kami tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2022. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 25,24%.

b. Persentase PMKS yang memiliki Usaha Mandiri

Program Keluarga Harapan turut mendukung keberhasilan indikator ini, dimana dari 1.125 orang yang mendapatkan bantuan Kesejahteraan ,pada tahun 2022 ada 9 orang yang sudah tidak termasuk keluarga penerima manfaat dari program tersebut.Dimana sesuai dengan kriteria penilaian untuk mendapatkan bantuan sudah tidak layak dan dianggap sudah mandiri secara ekonomi .

**2. Sasaran Menurunkan Beban PMKS, dengan 4 indikator masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :**

a. Persentase PMKS yang tercover dalam jaminan sosial kesehatan.

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan melakukan pelayanan terhadap PMKS dengan pemenuhan pelayanan BPJS yaitu sebanyak 51.862 ditambah PKH 571 Jiwa bantuan Komponen kesehatan dari keseluruhan jumlah PMKS berjumlah 65.549 Jiwa yang tersebar diKabupaten Morowali Utara. Capaian output dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai 79 Persen dari target 100%.

b. Persentase PMKS yang Tervercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yaitu berjumlah 5.820 dan 3.484 orang yang mendapatkan bantuan Jaminan Sosial Pendidikan dari PKH dan tersebar di 10 Kecamatan diKabupaten Morowali Utara.Capaian Output dari target tersebut mencapai target yaitu 100 %.

c. Persentase PMKS yang Tervercover Dalam Bantuan Sembako

Keberhasilan indikator ini dicapai dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang terdata dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yaitu

sebanyak 4.489 orang bantuan ini berupa Sembako melalui program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dimana pengambilan bantuan tersebut diambil die-Warung yang sudah bekerja sama dengan kegiatan tersebut. Sementara bantuan sembako lainnya diperuntukan bagi penyandang Disabilitas sebanyak 150 orang, begitu juga bantuan bagi Lansia sebanyak 252 orang. Capaian target dari indikator ini mencapai 7,4% dari target 100%.

d. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat. Pada Tahun 2022 jumlah bencana Alam dan sosial yang tertangani diKabupaten Morowali Utara mencapai target 100% yaitu bencana kebakaran dan putting beliung yang terdampak sebanyak 59 orang .Dimana bencana kebakaran diKecamatan Petasia berjumlah 27 orang,bencana kebakaran diKecamatan Petasia Timur 20 orang,bencana kebakaran diKecamatan Petasia Barat 8 orang dan bencana putting beliung diKecamatan Petasia Desa Ganda-Ganda yang terdampak yaitu 4 orang. Dari target tersebut Dinas Sosial mampu mencapai target 100%. Kegiatan selama masa tanggap darurat Dinas Sosial dibantu 23 orang Tagana (Taruna Siaga Bencana).

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Sosial

Realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian Organisasi Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel. 8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022**  
**Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%	25,24%	100,96%

		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%	0,8%	3,2%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	79%	79%	79%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%	100%	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	100%	7,4%	7,4%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 3 indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya  $\geq$  100% (melebihi target Renstra)
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya  $\geq$  70%
- 2 indikator kinerja sasaran capaian kinerja  $\leq$  50%

### 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sasaran Meningkatkan Kemandirian Ekonomi PMKS

Capaian rata-rata kinerja sasaran Pembinaan Manajemen/SDM Bagi Pendamping KUBE, dan bantuan PKH Mencapai 100%. Capaian ini dikategorikan Predikat Tinggi. Strategi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan pemberian bantuan Kube Karang Taruna untuk 25 KT yang tersebar di 7 Kecamatan sementara untuk bantuan PKH yaitu sebanyak 4.457 jiwa tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.

## 2. Sasaran Menurunkan Beban PMKS

Capaian rata-rata kinerja sasaran PMKS Tahun 2022 yakni 100%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat Sangat Baik. Strategi yang dilakukan adalah pemberian bantuan permakanaan (Gizi) dan alat bantu bagi Disabilitas, Pemberian Permakanan bagi Lansia . Bantuan untuk pendidikan melalui Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan untuk Siswa/Siswi tercover mulai SD,SMP sederajat ,SMA sederajat ,dan juga bantuan pendidikan yang tercover lainnya dari PKH (Program Keluarga Harapan).Bagi Korban Bencana Alam Dinas Sosial secara keseluruhan yang tercover diberikan bantuan berupa keperluan sandang,pangan,dan logistik yang diperlukan. Sementara Untuk Perlindungan sosial anak berhadapan dengan hukum, tindak lanjut dari kegiatan ini Dinas Sosial Daerah bekerja sama dengan pihak Kepolisian,Kejaksaan Cabang Negeri ,Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pengadilan Negeri, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3AD) untuk melakukan perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud Kinerjanya 100%.

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

#### a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasional	Rp. 4.016.419.317,-
2	Belanja Modal	Rp. 5.850.000,00,-
3	<b>Alokasi Total Belanja</b>	<b>Rp. 4.022.269.317,-</b>

Dari total anggaran sebesar Rp. 4.022.269.317,00,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasional	Rp.3.934.354.191,-
2	Belanja Modal	Rp.5.800.000,00,-

3	<b>Alokasi Total Belanja</b>	<b>Rp. 3.940.154.191,-</b>
---	------------------------------	----------------------------

Presentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasional	Rp. 3.934.354.191,-
2	Belanja Modal	Rp. 5.800.000,00,-
3	<b>Alokasi Total Belanja</b>	<b>Rp. 3.940.154.191,-</b>

$$\begin{aligned}
 \text{a. Belanja Operasional} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Alokasi Belanja Operasional}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 3.934.354.191,-}}{100\% \text{ Rp. 4.016.419.317,-}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{97,96\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. Belanja Modal} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Alokasi Belanja Modal}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.5.800.000,-}}{100\% \text{ Rp. 5.850.000,-}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{99,14\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. Total Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{100\% \text{ Alokasi Total Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 3.934.354.191,-}}{100\% \text{ Rp. 4.022.269.317,-}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{97,95\%}
 \end{aligned}$$

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 42 orang terdiri dari 24 orang ASN dan 17 orang tenaga Honorer. Dengan Jumlah tersebut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara mampu melaksanakan tugas, bertanggung jawab sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

### **3.1.6 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022**

1. Terwujudnya pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu Adil dan terjangkau.

Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT .

- Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah

Didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial

2. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial

Didukung oleh Program Rehabilitasi Sosial

3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Didukung oleh Program Penanganan Bencana

### **3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam RENSTRA Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Evaluasi Kelembagaan, Analisa Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, fasilitasi Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Sosial periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Sosial dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari

pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Dinas sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 4.022.269.317,-** (Empat milyar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh Sembilan tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kab. Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Operasional Rp. **4.016.419.317,-**
2. Belanja Modal Rp. **5.850.000,-**

Dalam tahun Anggaran 2022 untuk belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp. **4.016.419.317,-** dialokasikan untuk biaya pegawai terdiri dari :

**Tabel. 9**

<b>Belanja Operasional</b>	<b>Target Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>capaian</b>
1. Gaji Pokok PNS	Rp. 1.117.977.322	Rp.1.109.250.749	99%
2. Tunjangan Keluarga	Rp. 92.343.325	Rp. 91.429.319	99%
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 130.847.375	Rp. 130.130.000	99%
4. Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 29.385.000	Rp. 29.040.000	99%
5. Tunjangan Beras	Rp. 62.261.285	Rp. 61.557.000	99%
6. Tunjangan PPh	Rp. 5.214.802	Rp. 5.163.193	99%
7. Pembulatan Gaji	Rp. 14.428	Rp. 14.283	99%
8. BPJS	Rp. 47.012.884	Rp. 46.580.761	99%
9. Tambahan Penghasilan	Rp. 971.515.980	Rp. 937.471.956	96%
Jumlah	Rp. 2.456.572.401	<b>Rp. 2.410.637.261</b>	

Ikhtisar realisasi anggaran Belanja Operasional terhadap mencapai indikator kinerja sasaran sebesar **Rp. 3,934,354,191** pada Tahun Anggaran 2022 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 10**  
**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN**  
**TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	3.440.004.783	3.390.536.721	98,56%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri				
	JUMLAH			3.440.004.783	3.390.536.721	98,56%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tervercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	Program Rehabilitasi Sosial	54.247.400	42.795.000	78,88%
		Persentase PMKS yang Tervercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan		65.507.000	35.730.000	54,54%
		Persentase PMKS yang Tervercover Dalam Bantuan Sembako		128.361.100	127.521,450	99,34%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	Program Pemberdayaan Sosial	95.537.750	93.976.870	99,36%
			Program Penanganan Bencana	203.508.100	203,209,650	99,85%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memnuhi harapan sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama serta partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu dievaluasi dan menjadi perhatian oleh berbagai pihak.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui penilaian kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 4 (empat) Program dan 8 kegiatan dan 18 Sub kegiatan dengan besar anggaran Belanja Rp 4,022,269,317,- (empat miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan tiga ratus tujuh belas rupiah ) dan realisasi keuangan sebesar 3,934,354,191,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat seratus sembilan puluh satu) atau sebesar 98%.

Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, 3 indikator yang mencapai target yang direncanakan .Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

#### **4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Dinas Sosial Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
- 3) Mengoptimalkan pembinaan kepada PMKS dengan sumber daya yang ada.
- 4) Mengusulkan kegiatan baru dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya kesejahteraan sosial pada perencanaan sosial.

- 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan
- 6) Lebih meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya tergantung pada kinerja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh stakeholder di Bidang Sosial berikut pendukungnya. Dengan demikian kerjasama dan sinergi diantara pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Secara internal LAKIP ini harus dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan informasi yang selalu terbaru dan diperbaharui.

Kolonodale, Februari 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA



**Drs. YOSPID LABANGARA**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19630918 199303 1 009



**REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. YOSPID LABANGARA**

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **DR. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Agustus 2022

Pihak Kedua



Pihak Pertama

**Drs. YOSPID LABANGARA**  
NIP. 19650918 199303 1 009

**REVISI PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS SOSIAL DAERAH**  
**KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	25%
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	25%
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	100%
		Persentase PMKS yang Tercover Dalam Bantuan Sembako	100%
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.243.608.627,00	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 95.537.750,00	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 248.115.500,00	
4	Program Penanganan Bencana	Rp 203.508.100,00	

Pihak Kedua,



Kolonodale, Agustus 2022  
Pihak Pertama.

Kepala Dinas Sosial Daerah

  
**Drs. YOSPID LABANGARA**  
NIP. 196509181993031009





**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**DINAS SOSIAL DAERAH**

Jln.Poros Ganda-Ganda Kel.Bahoue ,Kec.Petasia,Kab.Morowali Utara – 94971  
Email : dinsosmorowaliutara@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR : 460/15/SK/DINSOS/VIII/2022

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL DAERAH TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang  
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib  
menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan  
masing-masing;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Kepala Dinas Sosial Daerah tentang Indikator Kinerja  
Utama Dinas Sosial Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-  
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4700);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang  
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi  
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH,



**Drs. YOSPID LABANGARA**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.19650918 199303 1 009

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

NOMOR : 460/15/SK/DINSOS/VIII/2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL DAERAH KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Keterangan/Formulasi IKU	Sumber Data
1	Meningkatkan kemandirian Ekonomi PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri secara Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri Secara Ekonomi}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Memiliki Usaha Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memiliki Usaha Mandiri}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial
2	Menurunkan Beban PMKS	Persentase PMKS yang Terverver Dalam Jaminan Sosial Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Terverver Dalam Jaminan Sosial Kesehatan}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Terverver Dalam Jaminan Sosial Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Terverver Dalam Jaminan Sosial Pendidikan}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Terverver Dalam Bantuan Sembako	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Terverver Dalam Bantuan Sembako}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani Selama Masa Tanggap Darurat}}{\text{Jumlah Total korban Bencana Alam}} \times 100\%$	Dinas Sosial

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal Agustus 2022



DINAS SOSIAL DAERAH,

**Drs. YOSPID LABANGARA**

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19650918 199303 1 009